

TAJUK RENCANA

Mencegah Kekerasan Seksual

KEMENTERIAN Agama (Kemag) kini sedang mempercepat proses penyediaan regulasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Regulasi tersebut nantinya akan berbentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) dan kini masih dalam tahap penyusunan draf yang dilanjutkan dengan langkah harmonisasi antarkementerian/lembaga terkait.

Regulasi ini nantinya akan menjadi landasan semua pihak, baik pemerintah, pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat untuk benar-benar terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan (KR 4/7).

Mengapa lembaga pendidikan keagamaan? Tak lain karena institusi ini tak bebas dari aksi kekerasan seksual. Semangat kelahiran PMA justru dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Terlebih, selama ini ada kesan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk di pesantren, cenderung tertutup.

Kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung oleh salah seorang tenaga pengajarnya beberapa waktu lalu menjadi contoh konkret betapa kekerasan seksual bisa terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Karena tindakan tersebut masuk kejahatan luar biasa, pelaku telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dari kasus tersebut nampak pula bahwa pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di pesantren sangat lemah.

Dengan lahirnya PMA tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, tentu harapannya ada strategi yang sistematis dan efektif untuk mencegah kejahatan tersebut. Selanjutnya, sistem pencegahan ini bisa menjadi model bagi lembaga sejenis lainnya untuk menerapkan strategi yang sama.

Kita memandang PMA tentang pencegahan dan penanggulangan

kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan merupakan turunan dari peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan April lalu. Dengan demikian, PMA tersebut tak boleh menyimpang atau bertentangan dengan UU TPKS. Kalaupun saat ini sedang dilakukan harmonisasi antarkementerian/lembaga terkait, substansinya tak boleh bertentangan dengan UU TPKS.

Hal yang selama ini kita sayangkan adalah banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan yang penyelesaiannya dilakukan secara internal. Dengan adanya UU TPKS, hal ini tak boleh dilakukan.

Bahkan tegas dalam UU TPKS, kasus kekerasan seksual tak boleh diselesaikan melalui mekanisme restorative justice yakni penyelesaian yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Ini sekaligus juga untuk menghindari upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan uang. Selain itu, untuk memberi efek jera kepada pelaku.

Hemat kita, semua lembaga pendidikan keagamaan, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, harus dapat diakses masyarakat. Orang tua yang telah mempercayakan putra putrinya belajar di lembaga pendidikan keagamaan harus memiliki akses untuk melakukan pengawasan. Harus kita akui, selama ini, orang tua seolah kehilangan akses mengawasi ketika menyerahkan anaknya kepada lembaga pendidikan keagamaan.

Dengan hadirnya PMA tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, kita berharap pengawasan internal diperketat. Mengapa? Karena dalam beberapa kasus, kekerasan seksual justru dilakukan oleh tenaga pengajar yang notabene seharusnya menjadi pelindung bagi peserta didiknya.

Idul Adha Mendidik Kesanggupan Berkorban

SESUAI perhitungan (hisab) astronomi, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 10 Zulhijah 1443 H atau Sabtu 9 Juli 2022 sebagai pelaksanaan Idul Adha. Umat Islam kembali melaksanakan ritual keagamaan berupa penyembelihan hewan kurban sebagai tanda ketaatan kepada Allah swt. Syariat Islam sebagai pedoman hidup, berisi ketentuan dan nilai-nilai baik dalam dimensi horizontal *muamalah* (sosial) maupun vertikal *ubudiyah* (ritual peribadahan).

Demikian halnya dalam perayaan dan peribadahan Idul Adha, begitu sarat dengan nilai pendidikan demi kemuliaan dan kesempurnaan manusia. Berdasar subjek peserta didiknya, setidaknya terdapat dua nilai kependidikan di dalam peribadahan Idul Adha: Pertama, secara tekstual sesuai etimologis *ied* yang berarti kembali dan *adha* berakar kata dari *udhiyah* yang berarti hewan kurban. Mengandung makna kependidikan bahwa para ahlul kurban dengan kesanggupan (kekuasaan) finansial yang dimiliki diharapkan sanggup menyediakan hewan kurban yang dagingnya dapat dinikmati orang lain khususnya kaum fakir dan miskin. Dalam konteks kepemimpinan, kesanggupan berkorban dalam makna yang lebih dalam adalah kesanggupan untuk mendahulukan kepentingan bawahan (anggota atau orang banyak) daripada kepentingan diri sendiri. Kesanggupan ini menjadi sikap keperwiraan sebagai konsekuensi atas kepemilikan kekuasaan lebih dibandingkan lainnya yakni kuasa yang membuat keputusan. Yang lazimnya disertai kuasa secara finansial (hasil imbalan atas peran tanggungjawabnya).

Pertanyaannya adalah realitas empiris kepemimpinan di sekitar kita sudah seperti gambaran ideal tersebut? Kekuasaan selalu memiliki sifat *adictif* yang membuat pemilikinya ketagihan untuk

Arif B Raharjo & Akhir Lusono

terus menikmati kekuasaan hingga terkadang membuat lupa diri. Karenanya kenikmatan kekuasaan cenderung melahirkan praktik koruptif-manipulasi, itu karenanya Lord Acton menyimpulkan bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (Lazarski, 2012)



KR-JOKO SANTOSO

Partisipasi luas dalam suatu kinerja organisasi ataupun gerakan sosial tertentu dapat diharapkan hadir dan tumbuh jika banyak pihak digembirakan, diakui dan dihargai kehadiran. Salah satu bentuk kegembiraan muncul adalah ketika seseorang merasa terlibat aktif dalam suatu proses (Dennison, 2006). Karenanya dalam setiap muktamar Muhammadiyah, para partisan yang sekadar turut memeriakan eventnya saja diberi sebutan 'penggembira' yang bukan untuk menggembirakan para pemimpin tetapi menggembira semua warga.

Kedua, nilai kependidikan idul adha adalah tumbuhnya ketaatan. Sesuai pepatah Ming di atas (raja alim raja dis-

embah). Yang bermakna pemimpin yang benar dan baik selayaknya dihormati dan dipatuhi. Fitrah sebagai rakyat, bawahan ataupun seorang anak adalah hormat dan taat pada perintah pemimpin atau orang tua. Begitu sang pemimpin atau orang tua berperilaku tidak terhormat dan lalim tentu menggugurkan kewajiban hormat dan taat semula.

Pendidikan berkorban di dalam agama Islam demikian humanis, pada akhirnya tujuannya kembali demi kebaikan manusia itu sendiri. Sebab Allah yang maha adil pengasih dan penyayang tidak akan pernah mengurbankan hambanya yang sanggup berkorban bagi orang lain atas namaNya. Kesanggupan sang hamba untuk berkorban sebagai bukti ketaatan itu sendiri, hal tersebut meniscayakanNya untuk memberikan jaminan keberlimpahan rizki sebagai penggantinya (QS as Saba'39).

Bukankah kasih sayang pada sesama yang disimbolisasikan kasih sayang Ibrahim kepada anak kandung semata wayangnya adalah inti dari seluruh pengurbanan? Idul kurban tidak lain adalah pendidikan kedermawanan atau *religious charity* (Tan Chee Beng, 2015) yang menjadi inti ajaran Islam yang bermakna agama yang menyejahterakan. □

Dr Arif B Raharjo MSi, Dosen Universitas Islam Indonesia
Dr Akhir Lusono SSn MM, Anggota Komisi Seni Budaya Islam MUI DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Rekonstruksi Nilai-Nilai Ketamansiswaan

SELAMA proses mengedit buku *Tamansiswa dan Indonesia: Kisah Perjuangan para Murid Ki Hadjar Dewantara* untuk menyambut Seabad Tamansiswa, 3 Juli 2022, saya memperoleh banyak pelajaran menarik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tamansiswa sebenarnya merupakan model pendidikan yang paripurna. Hal itu dapat dilihat dari *output*-nya. Alumni MULO Kweekschool Tamansiswa dan yang memperoleh didikan langsung dari Ki Hadjar Dewantara bagaikan mutiara. Mereka menunjukkan kualitas pribadi dan kepemimpinan yang berkarakter kuat.

Sebagian besar mereka hanya berhenti di *MULO Kweekschool* atau setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) empat tahun, tetapi kripahnya mampu menjangkau panggung nasional. Mereka tidak hanya menjadi pamong (guru) dalam arti sempit, yakni mengajar di kelas tetapi juga menjadi guru bangsa. Mereka rata-rata multitalenta. Selain sebagai pamong Tamansiswa, ada yang menjadi pengurus partai politik, pendiri dan pengurus organisasi kemasyarakatan, seniman, jurnalis dan lain-lain.

Kelebihan

Sebagai contoh, M Tauchid. Dia tidak sempat lulus dari *Kweekschool* di Purwokerto karena dikeluarkan akibat aktivitas politiknya. Namun, oleh Ki Hadjar dia direkrut untuk menjadi guru di Tamansiswa. Dalam perkembangannya, selain sebagai pamong, Ki Tauchid juga menjadi jurnalis dan politisi, sekaligus pemikir di bidang agraria. Ia mewariskan buku tentang agraria yang hingga kini masih banyak dirujuk.

Tokoh-tokoh lain yang masuk kategori murid Angkatan I Ki Hadjar Dewantara rata-rata memiliki catatan kelebihan. Misalnya, Ki Hadisukatno dikenal sebagai seniman dengan karya ciptanya berupa lagu-lagu dan dolanan anak, Ki Samawi aktivis kepanduan dan jurnalis yang kemudian mendirikan Surat Kabar

Darmanto

Harian Kedaulatan Rakyat. Juga Ki Hertog yang selain menjadi birokrat, anggota legislatif, juga aktif di bidang persepakbolaan.

Sayang pada usia genap satu abad, kejayaan Tamansiswa sangat menurun. Meminjam istilah Jayadi Kastari (KR, 28/6), mengalami kebangkrutan. Tidak ada sekolah di lingkungan Tamansiswa baik Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, dan Taman Madya/Taman Karya (SMK) yang kini menjadi rujukan atau contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam hal model pembelajaran maupun aspek lainnya. Untung masih ada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) yang dapat menyelamatkan sejarah keberadaan perguruan Tamansiswa. Padahal sebagai sebuah perguruan, Tamansiswa sesungguhnya telah berhasil menemukan jati diri model pendidikan khas Indonesia sebagai bentuk perpaduan antara konsep pendidikan Barat yang menekankan intelektualitas. Dan pendidikan model Timur yang mengedepankan olah rasa dan olah batin.

Tawaran Sistem

Secara normatif, model pendidikan Tamansiswa sebenarnya dapat menjadi tawaran sistem pendidikan yang ideal bagi Indonesia. Sudah terbukti, Tamansiswa mampu menghasilkan generasi militan yang memiliki kecintaan pada bangsa dan negara, kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak. Peduli budaya daerah, pola hidup sederhana dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Konsep merdeka belajar milik Tamansiswa sudah diadopsi dan dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk pengakuan, konsep

tersebut memang bagus. Namun, nilai-nilai Ketamansiswaan lain, belum banyak digali dan diimplementasikan.

Agar model pendidikan Tamansiswa dapat menjadi tawaran alternatif sistem pendidikan Indonesia, perlu ada revitalisasi, reaktualisasi, dan rekonstruksi nilai-nilai Ketamansiswaan. Untuk melangkah ke sana, idealnya Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa sebagai organ tertinggi dapat menjadi motor penggeraknya. Namun, bisa juga gerakan itu dimulai dari UST sebagai institusi yang mawadahi akademisi/intelektual Tamansiswa.

Cara lain? Dapat dibentuk Pusat Studi Tamansiswa oleh pihak-pihak yang memiliki komitmen sama. Tanpa adanya langkah terobosan yang signifikan, nilai-nilai Ketamansiswaan hanya menjadi kebanggaan masa lalu. Tetapi tidak berguna bagi masa depan bangsa dan negara. □

***) Darmanto**, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ketua Tim Editor Buku *Tamansiswa dan Indonesia: Kisah Perjuangan para Murid Ki Hadjar Dewantara*.

Pojok KR

Regulasi pencegahan kekerasan seksual masuk tahap harmonisasi.

-- Substansi tetap mengacu UU TPKS.

Apriyani/Fadia menang dramatis di Malaysia Open 2022.

-- Kembalikan kejayaan Indonesia.

Telusuri data kasus stunting, balita diimbau rajin ke Posyandu.

-- Butuh kesadaran orang tua.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Repotnya Jadi Rakyat Kecil

APA benar, jika membeli solar atau pertalite harus menggunakan aplikasi My Pertamina? Atau kalau mau beli minyak goreng yang harus menggunakan aplikasi peduli lindungi? Sungguh makin repot. Sebab belum tentu yang membeli minyak goreng itu, anak muda yang selalu siap bawa HP. Bisa jadi pembelinya seorang ibu-ibu sepuh yang tak pernah membawa telepon genggam. Apakah kemudian tidak boleh membeli hanya tak bawa HP? Atau kemungkinan yang membeli adalah bapak-bapak petani yang biasa gunakan solar untuk kepentingan alat membajak sawah yang biasa memang menggunakan BBM solar.

Maksud pembatasan membeli memang boleh saja. Tetapi

apakah tidak ada cara lain agar rakyat tak diribetkan pada masalah keseharian, hanya soal membeli minyak goreng. Padahal jauh-jauh sebelumnya Presiden Jokowi meminta seluruh aparat apa saja agar mempermudah birokrasi dalam bentuk apapun.

Maka rasanya akan berseberangan dengan peraturan-peraturan untuk membeli minyak goreng atau solar. Rakyat sudah lama menderita harus membeli minyak goreng dengan harga mahal. Sekarang, rakyat akan membeli barang-barang tersebut makin ribet dengan aplikasi. Mudah-mudahan keluhan rakyat ini mendapat perhatian para pembuat keputusan.

*Ny Fitri Atriani Ketandan
Trucuk, Klaten*

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussabaha, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efiy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanto.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).